



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 5 September 2022
Waktu	: Pukul 12.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Menerima Aspirasi terkait Tenaga Honoror
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 21 (dua puluh satu) dari 49 (empat puluh sembilan) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara C. Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi DKI Jakarta D. Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Sumatera Selatan E. Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Sumatera Utara F. Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Lampung G. Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Jawa Tengah H. Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Kalimantan Barat I. Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Jawa Barat J. Ketua DPN Forum Komunikasi Honoror Tenaga Kesehatan Indonesia K. Ketua Ikatan Honoror Kategori-II (HK-II) Polri L. Ketua Forum Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal M. Ketua Umum Perhimpunan Tenaga Honoror K-2

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi DKI Jakarta, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Sumatera Utara, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Lampung, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Jawa Barat, Ketua DPN Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan Indonesia, Ketua Ikatan Honorer Kategori-II (HK-II) Polri, Ketua Forum Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal, dan Ketua Umum Perhimpunan Tenaga Honorer K-2, dengan agenda menerima aspirasi terkait tenaga honorer, pada hari Senin, 5 September 2022, dibuka pukul 12.38 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi DKI Jakarta, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Sumatera Utara, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Lampung, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Jawa Barat, Ketua DPN Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan Indonesia, Ketua Ikatan Honorer Kategori-II (HK-II) Polri, Ketua Forum Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal, dan Ketua Umum Perhimpunan Tenaga Honorer K-2, dengan agenda menerima aspirasi terkait tenaga honorer, sebagai berikut:

1. Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara
Pada dasarnya Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara meminta agar DPR dapat mendorong pemerintah agar Banpol satpol PP dapat segera diangkat sebagai PNS sebagaimana dijelaskan dalam UU Pemda, bahwa Satpol PP adalah PNS, maka dari itu kami diberikan kejelasan masa depan kami. Sesuai dengan regulasi yang ada maka kami minta jadi PNS sesuai UU pemda pasal 256. Karena bagaimanapun juga kami dalam bertugas memiliki resiko yang tinggi kadang nyawa jadi taruah. Maka dari itu PNS adalah harga mati.

2. Ketua DPN Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan Indonesia
 - Sebagai bentuk wadah komunikasi, diskusi dan juga menampung aspirasi dari tenaga non ASN baik tenaga Kesehatan maupun tenaga non Kesehatan.
 - Menyampaikan aspirasi untuk mendapatkan kesejahteraan, kepastian status, dan regulasi.
 - Tenaga Kesehatan memberikan kontribusi dalam masa covid. Sebagaimana tenaga Kesehatan 75 % adalah honorer. Beban kerja di Kesehatan berat, resiko besar. Harusnya pemerintah menjadikan hal tersebut menjadi pertimbangan untuk mengangkat kami menjadi ASN. Kita menunggu kepastian agar seluruh tenaga honorer diangkat menjadi ASN atau PNS, kepastian adanya kemudahan dan regulasi yang berpihak misalnya melalui PP khusus. Hingga saat ini ada 255.249 tenaga honorer Kesehatan yang tercatat.

3. Ketua Ikatan Honorer Kategori-II (HK-II) Polri
Kami di Polda Sumut ada 2191 orang honorer. Kondisi kami sebenarnya dari mabes polri sudah mengajukan surat ke menpan agar kami diangkat menjadi PNS, tapi sampai sekarang tidak dilanjutkan. Bantulah kami jangan dipilah-pilah atau dibagi-bagi kami sehingga kami dapat prioritas untuk menjadi PNS

4. Ketua Forum Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal
Kami honorer 36 orang dari pemadam honorer dari Kab tegal, menyampaikan bahwa Kab Tegal telah mengajukan formasi 36 ke menpan, tapi sepertinya regulasi di menpan itu akan menghambat teman2 kami untuk diangkat sebagai pns. Kita sudah 20 tahun mengabdikan sehingga sudah memiliki ketrampilan yang baik. Boleh dikatakan semua damkar di Indonesia memiliki persoalan honorer yang kurang lebih sama.

5. Ketua umum Perhimpunan Tenaga Honorer K-2
Memperjuangkan guru, nakes, penyuluh, tenaga adm agar memiliki kejelasan nasib. Setelah PP manajem PPPK keluar dan disusul dengan Perpres maka ketersediaan tenaga teknis secara umum terjadi jarak antara analisis jabatan dengan kualifikasi para honorer. Karena kualifikasinya biasanya sarjana sementara honorer tenaga teknis kuaifikasinya sma. Perlu diperhatikan para honorer meski kualifikasi SMA akan tetapi memiliki pengalaman sehingga sudah siap bekerja karena sudah berkali-kali ikut pelatihan. Tentu hal lebih memudahkan pemerintah dalam penanganan masalah teknis daripada menerima pegawai baru berkualifikasi sarjana tapi harus melatih. Ditambah lagi ada Surat edaran menpan untuk pendataan honorer yang kadang justru bikin ruwet. Untuk itu kita berharap pendataan dapat diselesaikan lewat BKD.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi DKI Jakarta, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Sumatera Utara, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Lampung, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Jawa Barat, Ketua DPN Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan Indonesia, Ketua Ikatan Honorer Kategori-II (HK-II) Polri, Ketua Forum Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal, dan Ketua Umum Perhimpunan Tenaga Honorer K-2, dengan agenda menerima aspirasi terkait tenaga honorer, sebagai berikut:

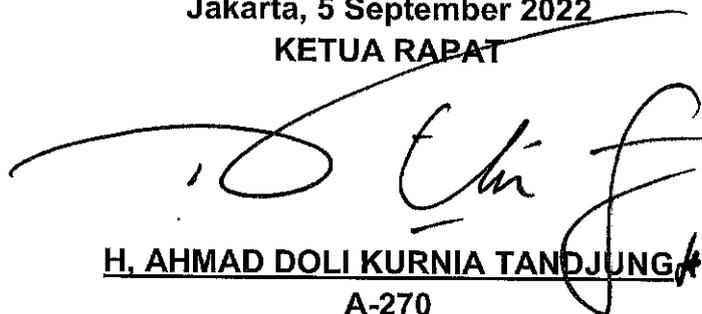
1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan audiensi/masukan dari DPP Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, DPN Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan Indonesia, Ikatan Honorer Kategori-II (HK-II) Polri, Forum Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal, dan Perhimpunan Tenaga Honorer K-2, dan akan bahas pada rapat intern Komisi dan/atau rapat kerja dengan Kementerian/Lembaga terkait.
2. Komisi II DPR RI akan mengupayakan dengan membentuk pansus tenaga honorer untuk menyelesaikan masalah honorer.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.28 WIB

Jakarta, 5 September 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270